

ANALISIS PEMBANGUNAN *CENTER POINT OF INDONESIA* (CPI) TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR DI KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Nur Achsanuddin UA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
email: nur.achsanuddin@unismuh.ac.id

A. Nur Fitrianti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
email: nur.fitrianti@unismuh.ac.id

Muhammad Yusuf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
email: muhammadyusuf@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of the Center Point Of Indonesias development (CPI) on the economy of coastal communities in Mariso District, Makassar City. Type research used is qualitative research. The research results show that Coastal communities experience changes in terms of decreasing the acquisition of marine products caused by fishing grounds and existing shellfish becoming less productive so it is difficult to get seafood like before. (ii) Coastal communities experience decreased change in income caused by a decrease in marine products obtained so that coastal communities have to pay more to get fish and other marine products. (iii) coastal communities experience changes in terms of employment status who have switched professions to other jobs other than fishermen due to a decrease in numbers income from work as a fisherman so that coastal communities choose to seek another job. (iv) coastal communities experience displacement of fishing areas for marine products due to the difficulty in obtaining marine products because the area that used to be is now land that is stockpiled for CPI development. (v) However, because some of the fishermen are old, they don't have the capital and background Low educational background causes some coastal communities to survive as fisherman

Keywords: Center Point of Indonesia's development, economy of coastal communities

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sumber daya laut yang melimpah sehingga banyak masyarakatnya yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai mata pencaharian utama. Namun, dengan kondisi sumber daya laut yang melimpah di kawasan pesisir, nyatanya belum mampu mensejahterakan masyarakatnya. Wilayah pesisir masih merupakan salah satu kawasan yang identik dengan kemiskinan. Kartasasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan

keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan (Suryana, dkk., 2022: 94).

Berbagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana jalan, di samping meningkatkan sumber daya manusia dan kesejahteraan ekonomi rakyat. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya membawa manfaat bagi aktivitas ekonomi karena memberikan akses produksi dan distribusi barang dan jasa untuk melayani konsumsi masyarakat (Sartono, 2019: 84). Salah satu

pembangunan yakni Jalan Metro Tanjung Bunga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah dimanfaatkan dan digunakan pada tahun 2002 sampai sekarang. Pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar dimaksudkan agar dapat mengurangi macet yang tercantum dalam Perda Kota Makassar No. 6 Tahun 2006 tentang RT RW Kota Makassar Tahun 2005-2015. Kawasan Metro Tanjung Bunga merupakan kelanjutan pembangunan kota baru sesuai dengan *master plan* yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan penetapan komposisi yang seimbang antara kawasan bisnis, wisata, dan pemukiman.

Kota Makassar juga termasuk salah satu kota yang melakukan pembangunan besar-besaran dengan visi jangka panjang sebagai kota dunia. Keberadaan *Center Point Of Indonesia* (CPI) memicu pesatnya pertumbuhan dan laju perekonomian kota yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitaran Pantai Losari. Daerah ini awalnya merupakan daerah yang dihuni oleh warga sekitar yang kurang mampu. Pekerjaan umum para warga adalah nelayan pencari kerang di bibir Pantai Losari dan/atau berdagang.

Tujuan pembangunan pada dasarnya dianggap baik, pantas dan atau seharusnya ada menurut penyelenggara pembangunan. Dengan kata lain, tujuan pembangunan adalah positif dari sudut pandang penyelenggaranya. Akan tetapi, dari sudut pandang orang lain, pembangunan tersebut tidak selalu berbuah hal-hal yang positif bagi mereka. Hal ini berarti, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi suatu komunitas atau bagi suatu segmen dari komunitas.

Pembangunan hingga saat ini senantiasa diyakini sebagai jalan yang harus ditempuh oleh manusia untuk mengembangkan kualitas dalam sistem kehidupan mereka, meski kehadirannya seringkali sangat beragam pada tiap-tiap konteks masyarakat. Olehnya itu masalah pembangunan seakan tidak pernah terhenti memenuhi ruang-ruang pertarungan wacana (Ruslin, 2017: 185). Dilihat dari aspek sosial ekonomi masyarakat, pembangunan *Central Point Of Indonesia* (CPI) dimaksudkan sebagai suatu pilihan pengembangan yang

dapat memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebagai alternatif pariwisata, sehingga akan berkontribusi besar dalam peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, di lain pihak, pembangunan ini memberi arti yang kurang menyenangkan bagi beberapa masyarakat yang merasakan dampak negatif, salah satunya yakni telah menghilangkan daerah penghidupan para pencari kerang. Kajian Walhi Sulsel mendapati jika terdapat sekitar 3.000-an kapal dan perahu nelayan yang terancam yang mengakibatkan nelayan di wilayah Kecamatan Mariso mengalami kesulitan dalam mencari ikan di sekitar perairan Makassar, serta alur transportasi perahu juga semakin menyempit seiring berjalannya pelaksanaan proyek CPI (Aspan, 2017: 175).

Dalam kaitannya dengan pembangunan, ekonomi Islam secara jelas telah menyatakan pentingnya suatu masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan perencanaan pembangunan secara cermat dan berusaha meningkatkan kualitas kehidupan melalui program pembangunan yang terarah. Allah swt. menciptakan manusia di muka bumi untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan memakmurkan kehidupan melalui kreativitas dan karya nyata di berbagai sektor kehidupan.

Dalam suatu hadist Qudtsi Allah swt. menyatakan bahwa Allah lebih menyukai hamba-Nya yang kuat daripada yang lemah. Pengertian kuat diartikan dalam perspektif yang luas yaitu kuat secara fisik maupun psikis untuk mengemban amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi sehingga membutuhkan kemampuan (*capability*) dan karakter kemanusiaan yang baik agar dapat dapat memainkan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. Melalui pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan dan seimbang akan mendorong peningkatan kualitas hidup manusia.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, tujuan dari pembangunan tidak hanya semata terpenuhinya kebutuhan fisik saja namun juga untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa.

Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam al-Quran dengan menunjukkan kata "keadilan" sebanyak 1000 kali sehingga ini menunjukkan keadilan merupakan nilai dasar yang dimuliakan (Sasono, 1998: 43). Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna bahwa tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain dalam setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi. Islam tidak menginginkan adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antara satu orang dengan orang lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap perekonomian masyarakat pesisir dengan judul "Analisis Pembangunan *Center Point of Indonesia* (CPI) Terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam".

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pembangunan

Adapun pembangunan menurut Alfian, dkk. (2021: 69) merupakan suatu proses perubahan untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Dalam aktivitas ini sering dilakukan perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumber daya alam. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya akan memberi pengaruh pada lingkungan hidup.

Dimensi dan Makna Pembangunan

Secara filosofis, suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga. Dengan perkataan lain, proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Menurut Todaro (2000), terdapat tiga komponen yang mendasari nilai-nilai inti yang memiliki fungsi sebagai pedoman maupun dasar untuk memahami dan mendalami makna pembangunan yang

sebenarnya, yakni harga diri (*self esteem*), kecukupan (*sustenance*), dan kebebasan (*freedom*). Harga diri dapat diartikan sebagai perasaan yang merasa berharga dan tidak dapat diperalat atau ditunggangi oleh tujuan orang lain. Kecukupan yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti tempat tinggal, makanan, Kesehatan, maupun rasa aman. Kebebasan adalah sikap yang dapat memilih sesuai dengan keinginan maupun kebutuhannya (Marha, dkk., 2022: 4811). Todaro berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi, pada hakekatnya, pembangunan ini harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individu.

Keadaan Perekonomian Masyarakat

Dalam bukunya, Soemarwoto mendefinisikan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik, maupun biologi (Primasanti dan Erna, 2021: 23). Aktivitas pembangunan akan menghasilkan dampak, baik pada manusia ataupun lingkungan hidup. Dampak terhadap manusia yakni meningkat atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang akan mendukung kelangsungan hidup manusia (Wardhana dalam Mahasiswa Sosiologi, 2017: 212)

Dewasa ini, kecenderungan untuk memanfaatkan kawasan pesisir sebagai daerah pengembangan yang baru tampak semakin besar. Hal ini oleh karena daerah pesisir relatif datar, harga lahannya masih rendah, dan dapat dicapai dari darat dan laut sehingga perubahan lingkungan pantai akibat kegiatan pembangunan akan berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Menurut Supriharyono (2000), perubahan tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat yang berakibat pada menurunnya pendapatan mereka (Tumbel, dkk., 2019: 23-24).

Interaksi Sosial Masyarakat

Menurut Satria (2002), nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Sedangkan, menurut Ditjen Perikanan, nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya/tanaman air. Adapun orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring atau mengangkat alat-alat perlengkapan ke dalam perahu kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan. Sedangkan ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkapan walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan ikan, dapat disebut sebagai nelayan (Ibrahim dan Dade, 2019: 30).

Tata Ruang

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 17 Ayat (1) tentang Cipta Kerja atas perubahan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 Ayat (2), ditegaskan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Kerangka konsepsi tata ruang meluas tidak hanya menyangkut suatu kawasan yang disebut sebagai wawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek nonspasial atau aspiial (bukan ketataruangan).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Anggito dan Setiawan, 2018: 8). Dalam penelitian ini, peneliti meneliti beberapa objek di antaranya masyarakat Kecamatan Mariso, pemerintahan, serta masyarakat yang bekerja di sekitaran *Center Point of Indonesia* (CPI) yang dapat

mendukung peneliti dalam mendapatkan data yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Informan

Tabel 1 Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Informan	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	9	60%
2	Perempuan	6	40%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan jumlah informan sebanyak 15 orang. Dari 15 orang yang menjadi informan terdapat 9 orang laki-laki atau 60% dan 6 orang perempuan atau 40%. Sebagian besar informan adalah laki-laki, nelayan dan sebagian kecil adalah ibu rumah tangga (istri nelayan).

Dampak Pembangunan Center Point of Indonesia (CPI) terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar

Untuk menjawab rumusan masalah yaitu apakah pembangunan *Center Point Of Indonesia* (CPI) berdampak terhadap perekonomian masyarakat pesisir di Kecamatan Mariso Kota Makassar, maka digunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Dalam penelitian ini didapatkan bahwa dampak pembangunan *Center Point Of Indonesia* (CPI) terhadap perekonomian masyarakat pesisir yaitu terjadinya penurunan dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh berkurangnya hasil-hasil laut yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Pattonangi Dg. Lurang yang pernah bekerja sebagai pencari kerang atau nelayan berikut ini.

“Sebelum pembangunan CPI, hasil-hasil laut yang didapatkan dan bisa

dijual masih melimpah dan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat pesisir, namun setelah adanya pembangunan CPI maka terjadi penurunan hasil laut sehingga pendapatan masyarakat berkurang dan masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan hasil laut untuk dijual” (Pattonangi Dg. Lurang, 26 Desember 2022).

Pembangunan CPI tentu membawa dampak perubahan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung hidup dengan hasil laut. Berikut penjelasan beberapa dampak terhadap aspek sosial ekonomi tersebut oleh informan.

Perubahan Jumlah Perolehan Hasil Laut

Keberadaan pembangunan CPI berdampak negatif yang ditandai dengan penurunan jumlah perolehan hasil-hasil laut informan yang diperoleh dari usahanya sebagai nelayan pencari ikan atau kerang di lokasi penelitian.

Hasil wawancara dengan masyarakat pesisir terkait dengan jumlah perolehan hasil laut, Syamsuddin Dg. Tunru mengemukakan bahwa:

“Masyarakat nelayan mengeluh atas menurunnya jumlah hasil laut yang didapatkan. Keluhan ini akibat adanya pembangunan proyek pembangunan CPI di lokasi tempat penangkapan ikan dan kerrang.” (Syamsuddin Dg. Tunru, 5 Januari 2023).

Secara keseluruhan, setelah adanya pembangunan CPI di lokasi penelitian, dapat dikatakan bahwa jumlah rata-rata kerang yang diperoleh informan kelompok nelayan pencari kerang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Padahal, seharusnya kelompok nelayan pencari kerang ini diuntungkan dengan terjadinya pendangkalan di perairan tersebut karena kerang laut hidup dan berkembang di perairan pasang surut yang dangkal, akan tetapi realita di lokasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari komoditi hasil tersebut kini telah hilang dari habitatnya karena kerang-kerang tidak dapat hidup dengan lingkungan baru setelah adanya proyek pembangunan.

Adapun alasan dari sebagian besar informan penelitian mengatakan bahwa menurunnya perolehan komoditas hasil laut tersebut merupakan dampak dari keberadaan pembangunan CPI yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air yang ditandai dengan hilangnya sebagian biota laut. Hal ini pada gilirannya juga berdampak terhadap semakin berkurangnya komoditas nelayan tersebut.

Perubahan Jumlah Perolehan Penghasilan

Perubahan perolehan penghasilan adalah jumlah penghasilan rata-rata informan perbulannya baik sebelum dan sesudah pembangunan CPI. Adanya pembangunan CPI berdampak terhadap penurunan jumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh informan. Hal ini selain karena dipengaruhi oleh perubahan perolehan hasil laut, informan juga harus mengeluarkan biaya bahan bakar tambahan untuk melakukan pekerjaannya sebagai nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir terkait jumlah penghasilan yang diperoleh setelah pembangunan CPI, Alimuddin Dg. Tawang mengemukakan bahwa:

“Sebelum adanya pembangunan CPI, pendapatan masyarakat cukup tinggi dari hasil tangkapan ikan dan kerang. Namun, setelah adanya pembangunan CPI, jumlah ikan di daerah yang mudah dijangkau mulai berkurang sehingga pendapatan masyarakat juga ikut berkurang. Akhirnya, masyarakat memutuskan untuk mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.” (Alimuddin Dg. Tawang, 3 Januari 2023).

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa terjadi perubahan yang menunjukkan penghasilan masyarakat pesisir menurun akibat pembangunan CPI yang menjadikan lahan tempat menangkap hasil laut semakin dangkal. Masyarakat juga harus mengeluarkan biaya operasional lebih besar untuk bekerja sebagai nelayan pencari ikan dan kerang, sehingga berdampak terhadap penurunan jumlah

penghasilan karena biaya operasional meningkat.

Penghasilan yang diperoleh dari hasil bekerjanya sebagai nelayan pencari ikan sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari karena harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat seiring meningkatnya harga dari hasil laut masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum ada pembangunan CPI penghasilan dari bekerja sebagai nelayan dan pencari kerang mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari, tetapi setelah ada pembangunan CPI, masyarakat pesisir atau nelayan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Merosotnya pendapatan informan dapat menjadi indikasi akan ancaman hilangnya mata pencaharian informan. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu dampak negatif karena kegiatan reklamasi pantai adalah terjadinya kerusakan ekosistem dan adanya ancaman kehilangan mata pencaharian untuk nelayan.

Perubahan Status Pekerjaan dan Alih Profesi

Aspek perubahan status dan alih profesi merupakan jumlah informan yang sebelum ada pembangunan CPI pekerjaan nelayan merupakan pekerjaan pokok kemudian sesudah ada pembangunan CPI pekerjaan pokoknya bukan lagi sebagai nelayan dan lebih jauh lagi pekerjaan sebagai nelayan sudah ditinggalkannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir terkait perubahan status pekerjaan dan alih profesi, Hawani Dg. Asseng mengemukakan bahwa:

“Pembangunan CPI menyebabkan lokasi mencari ikan dan kerang menjadi berkurang sehingga masyarakat harus mencari sumber penghasilan yang lain. Pembangunan CPI ini menjadikan masyarakat beralih profesi yang sebelumnya sebagai nelayan pencari ikan atau kerang berubah menjadi pedagang kaki lima, buruh bangunan, dan pekerjaan-pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Hawani Dg. Asseng, 6 Januari 2023).

Setelah adanya pembangunan CPI maka terjadi perubahan pekerjaan masyarakat pesisir. Sebelum ada pembangunan CPI masyarakat yang status pekerjaan pokoknya adalah sebagai nelayan, tetapi setelah pembangunan CPI profesi nelayan mengalami penurunan pendapatan. Pembangunan CPI juga tidak menyerap banyak tenaga kerja bagi masyarakat pesisir sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sesudah ada pembangunan CPI sebagian besar masyarakat pesisir dengan berbagai alasan mengalami perubahan pekerjaan. Masyarakat yang tadinya menghabiskan waktunya untuk bekerja sebagai nelayan penuh kemudian beralih kepada pekerjaan lain yang bukan nelayan karena pekerjaan utamanya yang dilakukan selama ini sebagai nelayan penghasilannya tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Hal ini didorong oleh faktor peningkatan kebutuhan keluarga yang diikuti dengan penurunan jumlah rata-rata penghasilan masyarakat yang pada gilirannya berdampak pada kehidupan keluarganya sehari-hari. Sedangkan dalam melakukan pekerjaan barunya yang bukan nelayan, masyarakat masih harus menghadapi kendala karena adanya faktor latar belakang seperti minat dan bakat serta kemampuan, baik modal usaha maupun latar belakang keahlian dan pengalaman serta pendidikan yang dimiliki masyarakat untuk menekuni pekerjaan lain selain nelayan.

Perubahan Lokasi Wilayah Penangkapan

Pembangunan CPI tentunya berakibat mengubah lokasi penangkapan para nelayan. Berpindahannya ke lokasi lain dalam mencari hasil laut karena berkurangnya jumlah hasil-hasil laut di wilayah penangkapan. Nelayan harus pindah lokasi ke tempat yang lebih jauh dari tempat sebelumnya.

Hasil wawancara dengan informan yang lain yaitu dengan masyarakat pesisir terkait perpindahan wilayah perolehan hasil laut, Hadina Dg. Mammi mengemukakan bahwa:

“Beberapa masyarakat mencari ikan dan kerang-kerang di lokasi yang berbeda dari tempat sebelumnya karena jumlah ikan dan kerang yang diperoleh di tempat sebelumnya mulai berkurang.

Beberapa masyarakat mencari ikan lebih jauh dari tempat sebelumnya untuk mendapatkan ikan lebih banyak.” (Hadina Dg. Mammi, 7 Januari 2023).

Keterangan Hadina Dg. Mammi ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir memilih berpindah tempat ke lokasi lain untuk mencari ikan dan kerang. Namun terdapat juga masyarakat yang bertahan di tempat yang sama untuk mencari ikan karena keterbatasan alat yang dimiliki.

Dampak Pembangunan CPI terhadap Perekonomian Masyarakat Pesisir dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima masalah pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, ketenteraan, dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri. Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia.

Pertumbuhan ekonomi sangat diperlukan untuk menanggulangi ketimpangan yang terjadi. Anjuran Islam terhadap kegiatan ekonomi bukan hanya untuk mengakumulasi modal, tetapi semata-mata untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Kemiskinan membuat individu tidak dapat menjalankan kewajiban pribadi, sosial dan moralnya, bahkan akan mengantarkan kepada kekufuran.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa dampak negatif yang dirasakan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan dampak positif, di mana terjadi penggeseran tempat mencari nafkah bagi mereka dengan adanya pembangunan CPI. Sementara, di dalam Islam itu sendiri harus ada faktor keadilan di dalam aktivitas perekonomian di mana tidak boleh ada pihak yang merasa terzalimi apalagi sampai

kehilangan mata pencaharian sebagai sumber penghasilan utamanya.

Pemerintah Kota Makassar memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan ekonomi. Pemerintah sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil. Terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat selaku pelaku ekonomi. Ketika pemerintah dan masyarakat tersebut bekerja bersama menjalankan perekonomian dengan baik, diharapkan keadilan, kesejahteraan akan tercipta untuk memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan ekonomi rakyat dan mengentaskan dari ketimpangan yang terjadi pada suatu daerah.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunitas nelayan di sekitar pembangunan CPI khususnya masyarakat pesisir di Kecamatan Mariso harus menerima dampak yang tidak menguntungkan dari pembangunan CPI antara lain:

1. Masyarakat pesisir mengalami perubahan dalam hal penurunan perolehan hasil-hasil laut yang disebabkan oleh lahan penangkapan ikan dan kerang-kerang yang ada menjadi berkurang sehingga sulit untuk mendapatkan hasil laut seperti dahulu lagi.
2. Masyarakat pesisir mengalami penurunan dalam penghasilan yang diperoleh, di mana hal ini disebabkan oleh adanya penurunan hasil laut yang diperoleh sehingga masyarakat pesisir harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapat ikan dan hasil-hasil laut lainnya.
3. Masyarakat pesisir mengalami perubahan status pekerjaan yang beralih ke pekerjaan lain yang bukan nelayan yang disebabkan oleh penurunan jumlah penghasilan dari pekerjaan sebagai nelayan sehingga masyarakat pesisir memilih untuk mencari pekerjaan lain.

4. Masyarakat pesisir mengalami perpindahan wilayah penangkapan hasil laut karena sulitnya mendapatkan hasil laut akibat wilayah yang dahulu kini menjadi lahan yang ditimbuni untuk pembangunan CPI.
5. Masyarakat pesisir yang memiliki usia yang tua, tidak memiliki modal dan latar belakang pendidikan yang rendah menyebabkan beberapa masyarakat pesisir tetap bertahan sebagai nelayan.
6. Dari perspektif ekonomi Islam, pembangunan CPI dirasa membawa dampak negatif yang tidak menciptakan keadilan ekonomi terhadap masyarakat pesisir di Kecamatan Mariso.

Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai dampak dari keberadaan pembangunan CPI terhadap perekonomian masyarakat pesisir maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penentu kebijakan harus memahami bahwa Kota Makassar bukan hanya milik masyarakat tertentu, ada masyarakat kecil hidup hanya dari penghasilan tangkap ikan dan kerang, kehidupan mereka bergantung di sana.
2. Pihak-pihak terkait agar dapat melakukan upaya pengembangan- pengembangan dan memberikan solusi-solusi alternatif yang relevan bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang terkena dampak langsung kegiatan pembangunan CPI.
3. Perlu adanya dukungan dari pemerintah dan pihak swasta terhadap peningkatan penyiapan dan persediaan modal kerja.
4. Perlu adanya pendistribusian bantuan berupa alat tangkap dan bahan bakar untuk transportasi nelayan.
5. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan serta dampak tindakan reklamasi dari aspek yang berbeda, sehingga akan menjadi pembandingan dan memperluas kajian ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Rd Muhammad, dkk. 2021. Analisis Masalah Sosial Dampak Reklamasi Pantai Losari. *Development Policy and Management Review*, Vol. 1 (2), hlm. 68-78.
- Alfansyur, Andarusni, Mariyani. 2020. Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber, dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5 (2).
- Anggito, Alby, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aspan, Zulkifli. 2017. Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar dalam Mega Proyek Center Point of Indonesia. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1 (2), hlm. 172-189.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2022. Katalog Kecamatan Mariso dalam Angka. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. 2022. Katalog Kota Makassar dalam Angka. Makassar: BPS Kota Makassar.
- Fajriansyah, Muhammad, Slamet Muchsin, Suyeno. 2022. Implementasi Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi Kasus tentang Pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Unisma Malang). *Jurnal Respon Publik*, Vol. 16 (9).
- Farid, Muhammad, dkk. 2018. *Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tumbel, Hegel, Salmin Dengo, Helly F. Kolondam. 2019. Pengaruh Reklamasi Pantai terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan (Studi Kasus Kelompok Nelayan di Kawasan Megamas). *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, Vol. V (084).

- Ibrahim, Dade Prat Untarti. 2019. Sejarah Masyarakat Nelayan Suku Bugis di Desa Polewali, Kecamatan Lainya Kabupaten Konawe Selatan (1950-2017). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah*, Vol. 4 (3), hlm. 29-37.
- Kurniullah, Ardhariksa Zukhruf, dkk. 2021. *Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Mahasiswa Sosiologi Minat Sosiologi Pembangunan UMM 2014. 2017. *Ketimpangan dalam Pembangunan*. Malang: Media Nusa Creative.
- Marha, Jihan, Guntur Eko Saputro, Hikmat Zakky Almubaroq. 2022. Pembangunan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewirausahaan dalam Upaya Meningkatkan Pertahanan Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3 (2).
- Primasanti, Yunita, Erna Indriastiningsih. 2021. Analisis Dampak Pencemaran Udara PT Delta Dunia Textile terhadap Kondisi Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika* Vol. 14 (1).
- Ruslin, Ismah Tita. 2017. Subaltern dan Kebijakan Pembangunan Reklamasi Pantai di Kota Makassar. *Jurnal Politik Profetik* Vol. 5 (2), hlm. 185-199.
- Sartono, S. 2019. Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut pada Dinas Perhubungan Kabupaten Muna Barat. *Journal Publicuho, Universitas Halu Oleo*, 2 (2), hlm. 84-98.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana, Djuhana Dadang, Lutfiyah, Tina Alfiani. 2022. Pengaruh Covid-19 terhadap Peningkatan Angka Pengangguran di Desa Setupatok Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 3 (2).
- UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang